

BUKTI FISIK SINERGI

Risalah Kebijakan Bidang Kesehatan Hewan

(Juni 2026)



Nama : Drh. Budi Santosa
NIP : 19720113 200501 1 001
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Tk. I/ IVb
Jabatan : Medik Veteriner Madya
Unit Kerja : Balai Veteriner Bukittinggi
Masa Penilaian : Januari – Desember 2026

BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM. 14 Kec. Baso Kab. Agam
Kotak Pos 35 Bukittinggi (2610)
Telp. (0752) 28300, Fax. (0752) 28290
Email : [bppv2 bukittinggi@yahoo.co.id](mailto:bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id)

RISALAH KEBIJAKAN:

Strategi Surveilans Terpadu untuk Flu Burung (HPAI) dan Rabies

Ringkasan Eksekutif

Flu Burung (*Highly Pathogenic Avian Influenza/HPAI*) dan Rabies merupakan dua penyakit zoonotik prioritas yang masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian nasional (WOAH, 2025; WHO, 2023). HPAI telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pada sektor perunggasan akibat kematian unggas, penurunan produksi, dan gangguan perdagangan (FAO, 2011). Sementara itu, Rabies masih menyebabkan kematian manusia di berbagai daerah endemis dengan tingkat fatalitas yang hampir 100 persen setelah gejala klinis muncul (WHO, 2023).

Data Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 14.886 sampel yang diuji untuk HPAI, sebanyak 1.251 sampel (8,4%) terdeteksi positif *Avian Influenza* (Balai Veteriner Bukittinggi, 2025). Sementara itu, pada pengujian Rabies, dari 205 sampel yang diperiksa, sebanyak 109 sampel (53%) dinyatakan positif (Balai Veteriner Bukittinggi, 2025). Data ini menunjukkan bahwa kedua penyakit masih aktif bersirkulasi dan memerlukan perhatian serius dalam upaya pengendaliannya (WOAH, 2025).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah sistem surveilans yang masih berjalan secara sektoral, belum terintegrasi antara kesehatan hewan dan kesehatan manusia, serta belum didukung oleh sistem informasi yang mampu menghasilkan peringatan dini secara efektif (WHO, WOAH, 2019). Oleh karena itu, diperlukan penguatan surveilans terpadu berbasis pendekatan *One Health* yang mengintegrasikan data epidemiologi, laboratorium, dan pelaporan lapangan dalam satu sistem kewaspadaan dini (WHO & WOAH, 2019).

1. Pendahuluan dan Latar Belakang

Flu Burung atau *Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)* dan Rabies merupakan dua penyakit zoonotik strategis yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional (WOAH, 2025; WHO, 2023). Kedua penyakit tersebut memiliki karakteristik penyebaran yang cepat, dampak sosial ekonomi yang luas, serta memerlukan pendekatan pengendalian lintas sektor melalui sistem surveilans yang kuat dan terintegrasi (WHO, FAO, & WOAH, 2019).

HPAI pernah menyebabkan kerugian ekonomi besar di Indonesia, terutama pada sektor perunggasan. Wabah HPAI mengakibatkan tingginya kematian unggas, penurunan produksi telur dan daging ayam, gangguan perdagangan unggas dan produk unggas, serta meningkatnya biaya pengendalian penyakit (FAO, 2011; Kementerian Pertanian RI, 2023). Selain kerugian ekonomi, HPAI juga memiliki risiko *zoonosis* karena beberapa strain virus dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan kematian (WHO, 2023).

Data Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 14.886 sampel yang diuji, sebanyak 1.251 sampel (8,4%) terdeteksi positif *Avian Influenza* (Balai Veteriner Bukittinggi, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa virus masih bersirkulasi pada populasi unggas dan berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit (WOAH, 2025).

Di sisi lain, Rabies masih menjadi ancaman *zoonosis* utama di berbagai daerah di Indonesia. Penyakit ini memiliki tingkat fatalitas hampir 100 persen setelah muncul gejala klinis pada manusia (WHO, 2023). Data Balai Veteriner Bukittinggi menunjukkan bahwa dari 205 sampel yang diperiksa pada tahun 2025, sebanyak 109 sampel (53%) dinyatakan positif Rabies (Balai Veteriner Bukittinggi, 2025). Tingginya

proporsi kasus positif menunjukkan bahwa Rabies masih menjadi masalah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat yang serius (WHO, 2023).

Keberhasilan pengendalian kedua penyakit tersebut sangat bergantung pada kemampuan sistem surveilans dalam mendeteksi dini, memonitor penyebaran penyakit, serta menyediakan informasi yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan (WHO, FAO, & WOA, 2019). Namun demikian, sistem surveilans yang ada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi.

2. Analisis Masalah dan Kesenjangan Kebijakan

Terdapat beberapa kesenjangan kebijakan yang menyebabkan sistem surveilans HPAI dan Rabies belum berjalan optimal;

- a. Sistem surveilans masih bersifat sektoral. Data kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan laboratorium belum terintegrasi secara efektif sehingga analisis risiko dan respons pengendalian sering terlambat dilakukan (WHO, FAO, & WOA, 2019).
- b. Deteksi dini kasus masih belum optimal. Pada HPAI, pelaporan kematian unggas masih rendah dan surveilans aktif di pasar unggas hidup belum menjangkau seluruh wilayah berisiko (Kementerian Pertanian RI, 2023). Pada Rabies, masih banyak kasus gigitan hewan penular Rabies yang terlambat dilaporkan sehingga meningkatkan risiko kematian pada manusia (WHO, 2023).
- c. Mobilitas hewan dan produk hewan yang tinggi meningkatkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah (WOA, 2025). Pengawasan lalu lintas unggas dan hewan penular Rabies belum sepenuhnya berbasis risiko (Kementerian Pertanian RI, 2023).
- d. Kapasitas laboratorium dan sumber daya manusia surveilans masih belum merata. Beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan fasilitas diagnostik maupun tenaga epidemiologi veteriner yang kompeten (FAO, 2011).

e. Implementasi pendekatan *One Health* masih menghadapi kendala koordinasi lintas sektor. Mekanisme pertukaran data dan pengambilan keputusan bersama belum berjalan secara optimal di seluruh daerah (WHO, FAO, & WOAHA, 2019).

3. Analisis Kebijakan yang Diusulkan

a. Penguatan surveilans terpadu berbasis *One Health* merupakan kebijakan yang paling relevan untuk menjawab tantangan pengendalian HPAI dan Rabies saat ini (WHO, FAO, & WOAHA, 2019).

b. Surveilans terpadu harus mampu mengintegrasikan data kesehatan hewan, kesehatan manusia, laboratorium, dan lingkungan dalam satu sistem informasi yang dapat diakses secara *real time* oleh seluruh pemangku kepentingan (WHO, FAO, & WOAHA, 2019). Integrasi ini akan mempercepat deteksi dini, analisis risiko, dan pengambilan keputusan pengendalian (WHO, FAO, & WOAHA, 2019).

c. Pada HPAI, surveilans aktif perlu difokuskan pada sentra produksi unggas, pasar unggas hidup, jalur distribusi unggas, serta wilayah dengan riwayat kasus (WOAHA, 2025). Pemeriksaan laboratorium menggunakan metode PCR dan surveilans serologis perlu diperluas untuk mendeteksi sirkulasi virus sebelum terjadi wabah (Kementerian Pertanian RI, 2023).

d. Pada Rabies, sistem surveilans perlu menghubungkan laporan gigitan hewan, hasil investigasi lapangan, data vaksinasi hewan penular Rabies, dan hasil laboratorium (Kementerian Pertanian RI, 2023). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi wilayah risiko tinggi sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih efektif (WHO, 2023).

e. Pengembangan sistem pelaporan digital nasional menjadi komponen penting dalam kebijakan ini. Sistem tersebut dapat menjadi sarana pertukaran data lintas

sektor sekaligus mendukung sistem peringatan dini berbasis analisis risiko epidemiologis (WHO, FAO, & WOAH, 2019).

4. Rekomendasi Kebijakan

1. Menetapkan surveilans terpadu berbasis *One Health* sebagai strategi nasional pengendalian HPAI dan Rabies.
2. Mengembangkan *platform* data nasional yang mengintegrasikan informasi kesehatan hewan, kesehatan manusia, laboratorium, dan lingkungan.
3. Memperkuat surveilans aktif pada sentra perunggasan, pasar unggas hidup, wilayah endemis Rabies, dan daerah berisiko tinggi.
4. Meningkatkan kapasitas laboratorium veteriner dan laboratorium kesehatan masyarakat untuk mendukung diagnosis yang cepat dan akurat.
5. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang epidemiologi veteriner, kesehatan masyarakat veteriner, dan surveilans penyakit zoonotik.
6. Mengembangkan sistem peringatan dini berbasis data laboratorium dan informasi epidemiologis.
7. Memperketat pengawasan lalu lintas unggas dan hewan penular Rabies antarwilayah.
8. Meningkatkan cakupan vaksinasi Rabies dan penerapan biosekuriti pada sektor perunggasan.
9. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaporan dini kasus penyakit melalui sistem pelaporan berbasis digital.
10. Memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, laboratorium, perguruan tinggi, dan organisasi internasional.

5. Penutup

HPAI dan Rabies masih menjadi ancaman zoonotik yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tingginya temuan positif HPAI dan Rabies di wilayah kerja Balai Veteriner Bukittinggi menunjukkan bahwa kedua penyakit tersebut masih aktif bersirkulasi dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan maupun ekonomi yang signifikan.

Penguatan surveilans terpadu berbasis *One Health* merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini, mempercepat respons pengendalian, dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sistem informasi yang terintegrasi, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pengendalian HPAI dan Rabies secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. World Health Organization. (2023). *Rabies Fact Sheet*. Geneva: World Health Organization. Diakses dari WHO Fact Sheets. Information about rabies fatality and global epidemiologi., Hlm. 1–4.
2. Food and Agriculture Organization. (2011). *Approaches to Controlling, Preventing and Eliminating H5N1 Highly Pathogenic Avian Influenza in Endemic Countries*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Hlm. 5–24.
3. World Organisation for Animal Health. (2025). *Terrestrial Animal Health Code*. Paris: World Organisation for Animal Health. Bab 8.8 (Infection with Avian Influenza Viruses) dan Bab 8.14 (Rabies Infection), hlm. 1–35.
4. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hlm. 12–56.
5. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Rabies di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hlm. 15–68
6. World Health Organization., Food and Agriculture Organization., & World Organisation for Animal Health. (2019). *Taking a Multisectoral, One Health*

Approach: A Tripartite Guide to Addressing Zoonotic Diseases in Countries.
Geneva: WHO. Hlm. 23–67.

7. Balai Veteriner Bukittinggi. Laporan Hasil Pengujian HPAI dan Rabies Tahun 2025. Bukittinggi.

Mengetahui,
Ditandatangani secara elektronik
oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP 197602182002121002

Bukittinggi, Juni 2026

Pelaksana
Medik Veteriner Madya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Santosa'.

Budi Santosa
NIP. 19720113200501 001